

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Fardiansyah, Hardi, 2022, *Penegakan Hukum Dalam Pandangan Sosiologi Hukum*. Dalam L. M. Ricard Zeldi Putra (Ed), *Sosiologi Hukum*, CV. Media Sains Indonesia-Bandung.
- Herimulyanto, Agustinus, 2019, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi, Teori dan Terapan Value-Based Confiscation System dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing,-Yogyakarta.
- Husein, Yunus, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)-Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Iskandar, Nandan, Amelya Gustina, Dyah Kusumastuti, Fitri Agustina Siregar, Aghia Khumaessi Suud dan Irfan Fachrurrozi, 2017, *Penguatan Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (Pakem) Demi Ketertiban Dan Ketenteraman Umum*, Kejaksaan Agung Pusat Penelitian Dan Pengembangan, Miswar-Jakarta.
- Lumbuun, T. Gayus 2014, *Pembaruan Struktur, Substansi, dan Kultur Hukum di Indonesia*, Dalam Hermansyah Imran Festy Rahma Hidayati Dinal Fedrian (Ed), *Problematika Hukum dan Peradilan*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia – Jakarta.
- Marbun, Andreas N, 2022, *Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Dalam Neka Rusyda Supriatna (Ed), Modul Pelatihan Calon Hakim Tindak Pidana Korupsi, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Jakarta.
- Makawimbang, Henrold Ferry, 2015, “*Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, suatu Pendekatan Hukum Progresif*”, Tafa Media-Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press-Mataram.
- Mulyadi, Lilik, 2020, *Model Ideal Pengembalian Aset (Assrt Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Kencana-Jakarta.
- Priyono, B. Herry, 2018, *Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, PT Gramedia Pustaka Utama-Jakarta.
- Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press-Banjarmasin.
- Saidi, Muhammad Djafar, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Press-Jakarta

- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press-Jakarta.
- Supardi.S, 2018, *Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana Yang Bekeadilan*, Penerbit Kencana-Jakarta.
- Suparni, Niniek, Sri Humana, Imas Sholihah dan Suryadi Agoes, 2017, *Optimalisasi Peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung Dalam Mendorong Satker Wilayah, Untuk Menyelesaikan Benda Sitaan dan Barang Rampasan*, Kejaksaan Agung Pusat Penelitian Dan Pengembangan, Miswar-Jakarta.
- Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama-Jakarta.
- Yanuar, Purwaning M, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni-Bandung.
- Yahya, Bettina, Budi Suhariyanto dan Muh. Ridha Hakim, 2017, *Urgensi Dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Puslitbang Hukum Peradilan Mahkamah Agung RI-Jakarta.
- Yusuf, Muhammad, 2013, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Gramedia-Jakarta.

Jurnal / Makalah :

- Abd. Rahman Saleh, Imam Fawaid, 2022, Karakter Hukum Korupsi Politik Di Indonesia Dan Amerika Serikat, *Jurnal Al-Hukmi Volume 3, No. 2, Nopember 2022*.
- Abvianto Syaifulloh, 2017, Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.1, Juni 2019*.
- Aliyth Prakarsa, Rena Yulia, 2017, Model Pengembalian Aset (Aset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 6 No. 1*.
- Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda, 2021, Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi, *Jurnal USM Law Review Vol 4 No 1 Tahun 2021*.
- Azyumardi Azra, 2002, Korupsi Dalam Perspektif *Good Governance*, *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. 1 Januari 2002*.
- Bismar Nasution, 2017, Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui *Civil Forfeiture*, makalah disampaikan dalam “Seminar Antikorupsi Jurnal Integritas KPK” dengan tema “Pemulihan Aset”, Medan, 5 Oktober 2017.
- Choky Ramadan, 2014, Pelaku Usaha (Harus) Melawan Korupsi, *Jurnal Fiat Justita Vol 2 No 2-Oktober 2014*.

- Firdaus Arifin, 2019, Problematika Hukum Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya, *Pagaruyung Law Journal* Vo.3. No.1 Tahun 2019.
- Galih Orlando, Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia, *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains* Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni 2022.
- Haswandi, 2017, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 1, Maret 2017*.
- Harris Y. P. Sibuea, 2016, Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol, *Jurnal Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016*
- Hendra Wijayanto, 2020, Menakar Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Covid19, *Gema Publica Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik* Vol 5, Nomor 2, Oktober 2020.
- Heri Joko Saputro, Tofik Yanuar Chandra, 2021, Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi, *Mizan: Journal of Islamic Law. Volume 5 Nomor 2-2021*.
- Hibnu Nugroho, Budiyo, Pranoto, 2016, Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16 No. 1, Maret 2016*.
- Ihwanul Muttaqin, 2019, Kontrol Pemerintah Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, *Res Judicata Volume 2, Nomor 2, Oktober 2019*.
- Imelda F.K. Bureni, 2016, Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 4, Oktober 2016*
- Irwan Hafid, 2021, Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif *Economic Analysis Of Law, LEXRenaissan No. 1 Vol. 6, Juli 2021*.
- Ika Darmika, 2016, Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 2 No. 3, 2016*.
- Krisdianto, 2015, Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga, *e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015*.
- Maggie Regina Imbar, 2015, Peran Jaksa Terhadap Aset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.
- Muhammad Fadhil, Taufik Rachman, Ahsan Yunus, 2022, Konstruksi Hukum Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Amanna Gappa, Nomor 30 Volume 1 tahun 2022*.

- Muhammad Noor Aziz, Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2012. Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechts Vinding, Vol. 1, No. 1, April 2012*.
- Muhamad Rakhmat, 2015, Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, *Mimbar, Vol. 31, No. 1, Juni, 2015*.
- Muhammad Rusydi Ridha, Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan Di Indonesia, Tesis. Universitas Islam Indonesia, tahun 2017.
- Nandang Sambas, Ade Mahmud, 2020, Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti, *Lex Lata Vol 2, No 3, November 2020*.
- Ni Luh Gede Yogi Arthani, 2016, Budaya Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Advokasi, Vol. 6, No. 2, 2016*.
- Puteri Hikmawati, 2019, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?, *Negara Hukum: Vol. 10, No. 1, Juni 2019*
- Refki Saputra, 2017, Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia, *Integritas, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017*.
- Rena Yulia, Hakikat Pengembalian Kerugian Negara; Sebuah Penghukuman Buat Pelaku Atau Pemulihan Bagi Korban?, *Lex Lata ,Vol 1, No 2 (Juli 2019)*.
- Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, *Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017*.
- Rosita Miladmahesi, 2020, Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi Di Indonesia, *Jurnal of Judicial Review Vol 22 No 1.*
- Rustam, 2017, Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat), *Jurnal Dimensi, Vol. 6, No. 2, Agustus 2017*.
- Saiful Abdullah, 2009, Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat, *Jurnal Law Reform, vol. 4, no. 2*.
- Satria Sukananda, Chrisinta Dewi Destiana, 2019, Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Teropong-Jurnal Peradilan Indonesia Volume 7, Juli-Desember 2019*.

Ulang Mangun Sosiawan, 2020, Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020.*

Yenti Garnasih, 2009, Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan UNCAC 2003, *Jurnal Hukum Prioris Volume 2 Nomor 3 September 2009.*

Tesis :

Ridha, MR, 2017, Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan Di Indonesia, *Tesis.* Universitas Islam Indonesia. (Tidak dipublikasikan).

Triastuti, A, 2010, Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, *Tesis,* Magister Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. (Tidak dipublikasikan)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-010 / A/ J.A / 05 / 2014 tentang Standar Opresional Pelacakan Aset.

Internet / Website :

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, tersedia di : <https://kbbi.web.id/pulih>, diakses pada tanggal 14 Mei 2023.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, tersedia di website <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia, tersedia di <http://tesaurus.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 8 September 2022.

Pusat Edukasi Anti Korupsi, “Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>, 24 Mei 2022, diakses tanggal 7 Januari 2023.

_____. “Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa”, 2023, tersedia di <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20230209-null>, 9 Februari 2023, diakses pada tanggal 22 Maret 2023.

Nengah Renaya, 2022, *Penerapan kerugian Perekonomian Negara dalam Perkara Korupsi yg berkaitan dengan Hajat Hidup Masyarakat*, kejadi-tebo.go.id, tersedia di <https://kejadi-tebo.go.id/berita/detail/penerapan-kerugian-perekonomian-negara-dalam-perkara-korupsi-yg-berkaitan-dengan-hajat-hidup-masyara>, 17 April 2022, diakses tanggal 14 Mei 2023.

Yunus Husein, *Follow The Money vs Follow The Suspect*, Okezone.com, tersedia di <https://economy.okezone.com/read/2008/04/28/212/104486/follow-the-money-vs-follow-the-suspect>, 28 April 2008, diakses tanggal 31 Januari 2023.

